

Transkrip Wawancara

Skripsi S-1 Hubungan Internasional

“The Bee’s Paradise: Analisis Solid-nya Negara-Negara Melanesia Mengecam Indonesia Terkait Papua dalam Lingkup Non-Western International Relations Theory Ibn Khaldun”

Nama : Andreas Brian Bagaskoro Bayuseno

NIM : 14010416140053

Dosen Pembimbing : Dr. Reni Windiani, MS

Tanggal Wawancara : 20 Agustus 2019

Lokasi : Pusat Penelitian Politik (P2P) LIPI

Widya Graha lantai XI

Jln. Jendral Gatot Subroto No.10

Data Narasumber : Dr. Adriana Elisabeth, M.Soc.Sc

Ketua Tim Kajian Papua

Biografi Narasumber : Merujuk pada website resmi LIPI, Dr. Adriana Elisabeth M.Soc.Sc, lahir di Jakarta pada 8 Juni 1963. Sejak 1989 bekerja sebagai peneliti di Pusat Penelitian Politik (P2P) LIPI, bidang politik internasional dengan bidang keahlian pembangunan regional Asia Tenggara, khususnya studi kerjasama sub-regional ekonomi di ASEAN. Pendidikan S1 bidang Hubungan Internasional diperoleh dari FISIP, Universitas Jayabaya, Jakarta pada 1987. Mengikuti program S2 di *Department of Social Science*, University of Tasmania, Australia dan mendapat gelar *master of social science* pada 1995. Selanjutnya, mengikuti program S3 di *Department of History and Politics*, University of Wollongong dan memperoleh PhD pada 2008. Menekuni kajian Papua sejak 2004. Pertama kali ke Papua (Sorong) pada tahun 1992 untuk membantu penelitian pemilu (Perspektif Kaum Muda tentang Pemilu) PPW LIPI.

No	Daftar Pertanyaan
1	<p>Mengapa adanya dua versi sejarah (versi pemerintah dengan versi peneliti luar) terkait dengan Papua khususnya terkait dengan <i>New York Aggrement 1962</i> ?</p> <p>Pemerintah Indonesia dengan peneliti luar negeri memiliki pendekatan yang berbeda dalam melihat sejarah Papua. Dari sisi pemerintah Indonesia, pemerintah Indonesia menekankan pada hasil, secara Hukum Internasional <i>New York Aggrement 1962</i> ini sudah sah dan sudah diakui oleh negara-negara. Sedangkan versi tandingan nya menekankan pada proses wilayah Papua masuk Indonesia. Prosesnya tidak adil ditambah dengan pemerintah Indonesia yang memperhatikan Papua. Ketika kita membaca literatur orang, jangan hanya melihat itu hitam dan putih, ktia harus lihat, apakah itu versi tersebut menekankan pada proses atau hasil. Selain itu, belum adanya argumentasi yang solid membuat antar kedua belah pihak juga memperkeruh suasana yang ada.</p> <p>Namun, meskipun ada beberapa pihak pro-Papua yang menggunakan dan membawa versi sejarah proses yang tidak adil, adanya pelanggaran HAM ini ke dimensi Internasional, namun ketika cara membawa versi sejarah ini salah, juga hal tersebut tidak diakui. Disatu sisi pembawaan yang salah, pemerintah Indonesia juga terkesan terlalu defensif dengan menyangkal tidak adanya pelanggaran HAM di Papua ini.</p>
2	<p>Dalam penelitian saya aktor-aktor internal utama yang membawa kasus Papua (HAM) ke dimensi Internasional bisa dibedakan. Aktor dengan pendekatan <i>Hard Power</i> (OPM) dan aktor yang menekankan pada <i>Soft Power</i> (ULMWP dan Tokoh Agama).</p> <p>Ya Betul. OPM itu yang bergerak di hutan-hutan, mengangkat senjata sedangkan yang ULMWP itu yang bergerak dengan provokasi dan diplomasi. Kadang ULMWP ini tidak setuju dengan caranya OPM dan sebaliknya.</p> <p>Saya ingin bertanya yang pertama terkait dengan OPM apakah kelompok OPM ini termaksud dalam tentara separatisme dan kelompok kriminal bersenjata ?</p> <p>OPM itu kelompoknya, caranya yang menggunakan tindakan kriminal tersebut, namun kalau dipilih antara itu kelompok kriminal atau tentara separatisme, menurut mereka (OPM) itu tentara bersenjata, namun jika diperhatikan dari luar, kelompok ini lebih mengarah kepada kelompok kriminal bersenjata, karena tindakan-tindakan yang dilakukan oleh OPM tidak semuanya bersifat ideologis, namun juga tentu ada yang bersifat pragmatis. Karena mereka juga punya keluarga, mereka juga butuh uang. Pergerakan mereka juga menentu, kadang bergerak kadang diam.</p> <p>Apakah ada afiliasi dengan suku-suku di Papua yang bergerak didalam organisasi-organisasi tersebut ?</p>

	<p>Pertama kamu harus tau dulu bahwa wilayah-wilayah di Papua ini terdiri dari 7 wilayah adat. Ketujuh wilayah adat tersebut adalah Mamta, Saerei, Ha'anim, Bomberai, Domberai, La Pago, dan Mee Pago. Kamu lihat saja daerah operasi dari organisasi-organisasi tersebut. Karena organisasi-organisasi ini ada daerah operasinya dan sangat memungkinkan anggota-anggota kelompok Pro-Papua ini berasal dari suku-suku tersebut. Jadi tidak bisa mengatakan kalau suku ini berafiliasi sama organisasi ini, kamu lihat saja daerah operasionalnya dan di daerah tersebut ada suku apa saja. Namun jumlahnya yang sedikit dan tersebar membuat pengejaran anggota-anggota ini sulit.</p>
3	<p>Saya ingin tanya perspektif dari rakyat Papua itu sendiri, terutama soal identitas apakah dari masyarakat Papua sendiri itu merasa identitasnya lebih kuat kepada Indonesia atau Melanesia ?</p> <p>Sangat kompleks jika berbicara mengenai identitas, sulit diukur apakah identitas tersebut mengarah ke Indonesia atau Melanesia, namun ada cerita menarik, orang Papua ketika di bandara, ditanya oleh petugas Imigrasi mengenai paspornya, bukan soal KTP nya.</p> <p>Hal ini kompleks karena kontesasi diantara orang Papua itu tinggi, sejak sejarah masa lampau terlihat pembelahannya antara orang Papua pro- Indonesia dan orang Papua pro-Papua, hal ini di kemudian hari bisa bertambah. Jika diibaratkan Indonesia dan Papua itu seperti orangtua dan anak. Indonesia sebagai orangtua harus mendengar anak (Papua) mengapa kamu pingin merdeka ? Kita harus tanya langsung kepada rakyat Papua, kita harus tau apa yang mereka rasakan, jangan datang tiba-tiba. Mereka merasa tidak dimengerti, mereka merasa tidak didengar.</p> <p>Anak Papua sekarang tidak takut mati. Mati sekarang atau mati besok sama saja. Mereka tidak takut diancam. Solidaritas ini kuat karena permasalahan faktual saat ini (HAM) hal ini kebetulan diperkuat dengan identitas ras Melanesia. Hal ini menyangkut harkat dan martabat manusia. Tidak usah imajinasi Papua merdeka, nanti kamu terpeleset sendiri.</p>
4	<p>Dari penelitian Dr.Adriana Elisabeth, setidaknya ada 20 aktor non-state dan ada 3 yang berafiliasi sama Agama, apakah dalam dimensi kasus Papua ini ada pengaruh dari agama juga terkhususnya pada Agama yang menjadi mayoritas di tanah Papua ?</p> <p>Selain agama mayoritas (Kristen dan Katolik) Islamnya Papua itu juga berkembang pesat loh dan bagus, namun berbica tentang agama mayoritas ya, gereja-gereja di Papua itu banyak yang merupakan gereja yang cabangnya dari luar, jadi tidak hanya di Melanesia. Peristiwa detik tersebut yang terjadi di Papua bisa langsung diketahui oleh gereja diluar setiap saat. Namun, Gereja hanya menyentuh pada ranah humanitarian. Karena HAM jelas merupakan humanitarian dan semua negara mengakuinya. Gereja menjadi salah satu tempat Papua untuk mencurahkan cerita. Tapi perlu tau juga bahwa adat Papua itu masih kuat.</p>

5

Apakah kasus HAM ini mempengaruhi Indonesia dalam misi Indonesia menjadi anggota Dewan HAM PBB ?

Sebenarnya kalau menurut saya kalau mau menjadi anggota itu gampang, tapi bagaimana beban moral yang ada ketika menjadi anggota tapi tidak bisa menyelesaikan permasalahan HAM dalam internal sendiri. Kan nanti kita malu sendiri kalau kita jadi anggota tapi tidak bisa menyelesaikan masalah sendiri.

Dokumentasi

